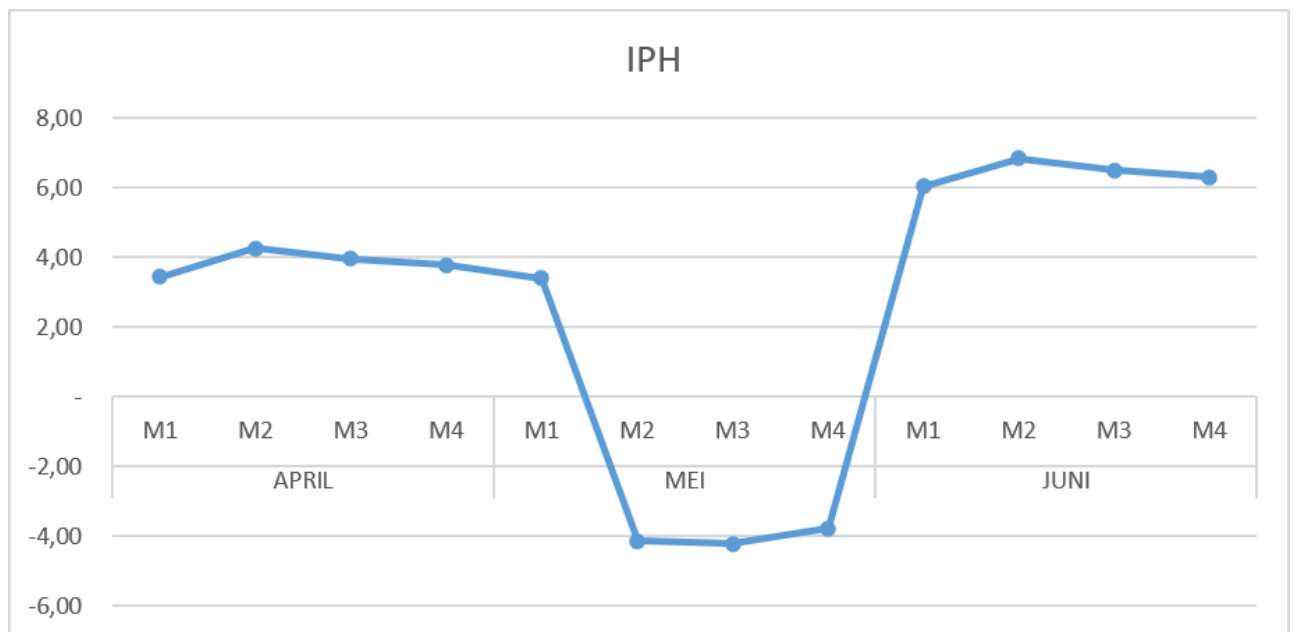


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.



BULAN	MINGGU	IPH	ANDIL IPH
APRIL	M1	3,44	Cabai Rawit(1,7131), Cabai Merah(0,9555), Daging Ayam Ras(0,6122)
	M2	4,25	CABAI MERAH(1,7834), CABAI RAWIT(1,5833), DAGING AYAM RAS(0,7298)
	M3	3,96	CABAI MERAH(2,562), CABAI RAWIT(1,2487), DAGING AYAM RAS(0,7636)
	M4	3,78	CABAI MERAH(2,268),DAGING AYAM RAS(0,921), CABAI RAWIT(0,7868)
MEI	M1	3,39	CABAI MERAH(2,3742),DAGING AYAM RAS(0,7991), CABAI RAWIT(0,5236)
	M2	-4,14	DAGING AYAM RAS(-2,1026), CABAI RAWIT(-1,2893), BERAS (-0,6019)
	M3	-4,22	DAGING AYAM RAS(-2,1026), CABAI RAWIT(-1,3172), BERAS (-0,5468)
	M4	-3,79	DAGING AYAM RAS(-2,1026), CABAI RAWIT(-1,2026), BERAS (-0,3976)
JUNI	M1	6,04	BERAS MERAH (3,1738), CABAI RAWIT (1,3897), DAGING AYAM RAS (0,6293)
	M2	6,85	CABAI MERAH (3,1738), CABAI RAWIT (1,6143), BAWANG MERAH (1,1655)
	M3	6,51	CABAI MERAH (2,4587), CABAI RAWIT (1,6719), BAWANG MERAH (1,3738)
	M4	6,30	CABAI MERAH (2,0268), CABAI RAWIT (1,6143), BAWANG MERAH (1,5095)

Berdasarkan data tabel yang disajikan, **perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH)** yang mencerminkan pergerakan harga barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting) mengalami fluktuasi signifikan dari bulan April hingga Juni.

Berikut adalah analisis komprehensif mengenai tren harga komoditas dan risiko ke depan:

Perkembangan IPH dan Komoditas Pokok

◦ Bulan April (Tren Kenaikan Awal):

IPH dibuka pada angka **3,44** pada minggu pertama (M1) dan memuncak di **4,25** pada M2, sebelum sedikit melandai ke **3,78** di M4. Pemicu utama kenaikan harga (*andil*) secara konsisten adalah **Cabai Merah, Cabai Rawit, dan Daging Ayam Ras**.

◦ Bulan Mei (Deflasi/Penurunan Harga Tajam):

Meskipun M1 masih mencatatkan IPH positif (**3,39**), terjadi pembalikan harga yang sangat tajam sejak M2 hingga M4 dengan IPH minus mencapai **-4,14 hingga -3,79**. Penurunan inflasi daerah ini didorong oleh merosotnya harga **Daging Ayam Ras, Cabai Rawit, dan Beras** (terlihat dari andil negatifnya yang besar, seperti Daging Ayam Ras di angka -2,1026). Hal ini mengindikasikan adanya masa panen raya atau pasokan yang melimpah di pasar.

◦ Bulan Juni (Lonjakan Inflasi Tinggi):

Memasuki bulan Juni, tekanan IPH melonjak drastis ke level tertinggi sepanjang periode, berkisar antara **6,04 hingga 6,85**. Komoditas utama penyebab inflasi ini bergeser ke **Beras Merah, Cabai Merah, Cabai Rawit**, serta masuknya komoditas baru yaitu **Bawang Merah** yang memberikan andil cukup besar (mencapai 1,5095 di M4).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan perkembangan inflasi Triwulan II, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi daerah, sebagai berikut:

◦ Ketergantungan Tinggi pada Pasokan Pangan dari Luar Daerah

Ketersediaan komoditas strategis seperti beras dan bawang merah masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga rentan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi harga di daerah pemasok.

◦ Volatilitas Tinggi Komoditas Hortikultura

Komoditas cabai merah dan cabai rawit secara konsisten menjadi penyumbang inflasi, yang menunjukkan tingginya sensitivitas terhadap faktor cuaca, musim tanam, serta keterbatasan pola tanam yang belum terencana dengan baik.

◦ Tekanan pada Komoditas Pangan Strategis

Meningkatnya andil beras dan daging ayam ras dalam inflasi mengindikasikan adanya tekanan pada sisi pasokan, distribusi, maupun biaya produksi, yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

◦ Distribusi dan Rantai Pasok Belum Efisien

Masih terdapat kendala dalam kelancaran distribusi, termasuk keterbatasan infrastruktur, panjangnya rantai pasok, serta belum optimalnya kerja sama antar daerah (KAD), yang menyebabkan disparitas harga antar wilayah.

- **Keterbatasan Data dan Sistem Informasi Harga**

Pemantauan harga belum sepenuhnya terintegrasi dan real time, sehingga menyulitkan dalam pengambilan keputusan cepat dan akurat dalam pengendalian inflasi.

- **Peningkatan Permintaan Musiman**

Lonjakan permintaan pada periode tertentu, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), belum sepenuhnya diantisipasi dengan kesiapan pasokan yang memadai.

- **Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Optimal**

Sinergi antar perangkat daerah, instansi vertikal, dan pelaku usaha masih perlu diperkuat, khususnya dalam hal pengendalian pasokan, distribusi, dan stabilisasi harga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah selama Triwulan II, Pemerintah Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan berbagai kebijakan secara terintegrasi melalui pendekatan **4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)**.

1. **Ketersediaan Pasokan**

Upaya menjaga ketersediaan pasokan dilakukan melalui:

Melakukan Pemantauan Harga dan Stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.

- Pemantauan Harga Bahan Pokok secara Reguler (Setiap Hari) oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Koperasi UKM dan Perindag Minahasa Tenggara dan Melakukan Monitoring Hargadan Ketersediaan Stok di Pasar-pasar Tradisional di Kabupaten Minahasa Tenggara oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Menjaga Pasokan Bahan Pokok dan barang

- Untuk komoditas penyumbang kenaikan harga di Kabupaten Minahasa Tenggara maka diupayakan produk yang dihasilkan di Kabupaten Minahasa Tenggara diprioritaskan dijual di Minahasa Tenggara sebagai contoh komoditi cabai dihimbau dan dimintakan kepada petani cabai apalagi yang ada pendampingan dari perangkat Daerah terkait serta dibawah pemantauan hukum tua/kepala desa agar hasil tersebut dijual pada pedagang lokal dan kelebihannya bafu dijual kepada pedagang antar pulau;
- Membuat Surat Sekretaris Daerah Tanggal 11 Maret 2026 Nomor 500/600/SETDA tentang Himbauan kepada Camat untuk melakukan pengawasan LPG Tabung 3 Kg.
- Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjamin terpenuhny kebutuhan, TPID Kab Minahasa Tenggara melakukan Kunjungan ke Pasar -pasar Rakyat dalam menjaga Pasokan Bahan Pokok dan Barang Penting.

Keterjangkauan Harga

2.

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, telah dilakukan:

- Pasar Murah melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan untuk menekan harga
- Pengawasan harga di pasar tradisional dan ritel modern untuk mencegah spekulasi harga.
- Melakukan sidak atas mata rantai pasokan barang penting khususnya LPG 3 Kg agar Pangkalan menjual sesuai harga HET dan tepat sasaran penerima serta ketersediaan dapat dijamin ada sampai pada perayaan Idul Fitri.

3. Kelancaran Distribusi

Kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan penting selama Triwulan I secara umum **berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dalam meredam tekanan harga**. Hal ini tercermin dari masih terjadinya kenaikan harga pada sejumlah komoditas strategis seperti beras, cabai, dan daging ayam ras yang dipengaruhi oleh faktor distribusi dan rantai pasok.

4. Komunikasi Efektif

Penguatan komunikasi dilakukan melalui:

Melaksanakan Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi

- Rapat koordinasi TPID secara berkala untuk merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi; TPID Kabupaten Minahasa Tenggara senantiasa melakukan koordinasi dan konsolidasi secara rutin dan insidentil, khususnya memantau perkembangan inflasi, data pasokan dan harga komoditas Rapat Koordinasi dilakukan setelah pelaksanaan Rakornas TPID via Zoom Meeting setiap hari senin.
- Pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Melaksanakan HLM TPID Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2026 terkait Dengan 3 Agenda Penting, yaitu :
 1. Membahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Di Daerah Sebagai Tindak Lanjut Dari Arah Presiden Republik Indonesia.
 2. Diskusi Kegiatan TPID Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional Idul Fitri Tahun 2026.
 3. Penetapan Program Unggulan TPID Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2026 dari Beberapa Usulan yang Dibahas oleh Tim TPID Kabupaten Minahasa Tenggara.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah selama Triwulan I menunjukkan bahwa berbagai langkah yang ditempuh melalui pendekatan 4K telah berjalan, namun efektivitasnya masih belum optimal dalam meredam tekanan inflasi yang meningkat secara bertahap dan meluas.

Dari sisi ketersediaan pasokan, upaya pemantauan stok dan koordinasi dengan daerah pemasok telah dilakukan, namun belum sepenuhnya mampu mengantisipasi lonjakan harga, terutama pada komoditas strategis seperti beras dan daging ayam ras. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pasokan masih bersifat reaktif dan belum berbasis proyeksi kebutuhan

secara komprehensif.

Pada aspek keterjangkauan harga, pelaksanaan operasi pasar dan intervensi harga telah membantu menjaga stabilitas pada waktu tertentu, namun efektivitasnya masih terbatas karena belum dilaksanakan secara konsisten dan belum sepenuhnya tepat waktu pada saat terjadi kenaikan harga yang signifikan. Dengan demikian, dampaknya terhadap pengendalian inflasi masih bersifat jangka pendek.

Dari sisi kelancaran distribusi, koordinasi lintas sektor dan upaya menjaga distribusi telah dilakukan, namun masih terdapat kendala struktural seperti panjangnya rantai pasok dan ketergantungan terhadap daerah pemasok. Hal ini menyebabkan disparitas harga dan memperlambat respon terhadap gejolak harga di pasar.

Sementara itu, pada aspek komunikasi efektif, koordinasi TPID dan penyampaian informasi kepada masyarakat telah berjalan, namun pemanfaatan data harga secara real time masih belum optimal, sehingga pengambilan keputusan belum sepenuhnya cepat dan berbasis data akurat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dengan memperhatikan tren inflasi yang meningkat dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Triwulan I, diperlukan langkah pengendalian yang **lebih antisipatif, terintegrasi, dan berbasis data** melalui penguatan strategi 4K sebagai berikut:

1. Penguatan Ketersediaan Pasokan

- Menyusun **proyeksi neraca pangan daerah (supply-demand)** berbasis data untuk komoditas prioritas (beras, cabai, bawang merah, daging ayam ras);
- Meningkatkan **kerja sama antar daerah (KAD)** dengan wilayah surplus sebagai pemasok tetap (contract farming/offtaker);
- Melaksanakan **gerakan tanam cepat (quick wins)** khususnya cabai dan hortikultura pada sentra produksi;
- Memperkuat **cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)** untuk intervensi pada saat terjadi gejolak harga;
- Mendorong peran BUMD pangan sebagai **buffer stock dan stabilisator harga**.

2. Pengendalian Keterjangkauan Harga

- Melaksanakan **operasi pasar/pasar murah secara terjadwal dan berbasis trigger harga** (early warning system);
- Memberikan **subsidi transportasi/distribusi** untuk menekan harga di wilayah dengan disparitas tinggi;
- Menetapkan **komoditas prioritas pengendalian inflasi (top 5)** secara dinamis berdasarkan andil inflasi;
- Memperkuat **pengawasan harga dan penegakan aturan** untuk mencegah spekulasi dan penimbunan.

3. Peningkatan Kelancaran Distribusi

- Mengoptimalkan **rantai distribusi yang lebih pendek (short supply chain)** melalui kemitraan langsung produsen-pasar;
- Menetapkan **jalur distribusi prioritas** dan memastikan kelancaran logistik untuk komoditas strategis;
- Memperkuat **sinergi dengan instansi transportasi dan perdagangan** untuk

mengatasi hambatan distribusi;

- Mengembangkan **sistem distribusi berbasis digital/logistik terintegrasi**.

4. Penguatan Komunikasi Efektif

- Mengembangkan **dashboard inflasi daerah berbasis data real time** sebagai dasar pengambilan keputusan;
- Melaksanakan **high level meeting TPID secara rutin dan berbasis isu aktual**;
- Menyampaikan **informasi harga dan ketersediaan secara transparan** untuk menjaga ekspektasi masyarakat;
- Mendorong **kampanye konsumsi bijak dan substitusi pangan** (misalnya diversifikasi pangan lokal).

Penguatan Peran dan Sinergi TPID di Kabupaten Minahasa Tenggara

- Optimalisasi koordinasi lintas sektor OPD, Bank Indonesia, BPS, Bulog untuk memantau dan mengelola dinamika harga Komoditas pokok
- Program kerja sama antar daerah dan tindaklanjutnya harus ada perhatian dan Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi KAD dimaksud